

Pengaruh Faktor Diskriminasi, Keadilan dan Teknologi Informasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Penggelapan Pajak di KPP Pratama Jember

¹| Octavia Paramitha, ²| Dwi Cahyono, ³| Diah Probowulan

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Jember,
Jawa Timur, Indonesia

e-mail: ¹| Octaviaparamitha98@gmail.com, ²| diyah768@gmail.com

Abstrak

Dalam penelitian ini bermaksud untuk menguji guna memperoleh data mengenai pengaruh faktor diskriminasi, keadilan, teknologi dan informasi pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dan sumber data berasal dari data primer melalui kuesioner. Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Non-Probability Sampling. Sehingga sampel yang diperoleh sebanyak 100 responden. Jumlah sampel yang dianalisis berjumlah 100 kuesioner dan data tersebut di analisis menggunakan metode Uji Regresi Berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu; variabel diskriminasi dan variabel keadilan berpengaruh signifikan dengan nilai positif, sedangkan variabel teknologi dan informasi berpengaruh signifikan dengan nilai negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember.

Kata kunci: Diskriminasi, Keadilan, Teknologi dan Informasi Pajak, Persepsi Penggelapan Pajak.

Abstract

In this study intends to examine in order to obtain data on the influence of factors of discrimination, justice, technology and tax information on taxpayers' perceptions of tax evasion in the Jember Primary Tax Service Office. This type of research is quantitative and data sources are derived from primary data through questionnaires. The population in this study is individual taxpayers. The sampling technique in this study uses the Non-Probability Sampling method. So that the samples obtained were 100 respondents. The number of samples analyzed was 100 questionnaires and the data was analyzed using the Multiple Regression Test method. The results of this study are; discrimination and justice variables have a significant positive effect, while technology and information variables have a significant negative effect on taxpayers' perceptions of tax evasion in the Jember Pratama Tax Office.

Keywords: *Discrimination, Justice, Tax Technology and Information, Perception of Tax Evasion.*

PENDAHULUAN

Dalam negara pastinya memerlukan dana guna mengelola rumah tangga negaranya sendiri, maka dari itu suatu negara membutuhkan pendapatan atau pemasukan untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam negara memerlukan dana guna membiayai semua kegiatan

yang dilakukan untuk pengeluaran dalam menjalankan roda pemerintahan ataupun pengeluaran yang digunakan untuk pengeluaran rutin (Ardiyaksa dan Kriswanto, 2014). Dalam membiayai negara seperti melakukan pembangunan nasional, para pemerintah terus berusaha untuk mempertinggi tingkat penerimaannya

dalam negeri.

Di Indonesia sendiri, dana pendapatan negara didapat dari APBN (Anggaran Dana Belanja Negara). Dimana APBN ini terdapat beberapa sektor pendapatan dana yang terdiri dari sektor pajak, sektor penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Pendapatan dana terbesar

di Indonesia di peroleh oleh sektor pajak. Namun penerimaan pajak selama empat tahun terakhir ini tidak mencapai target penerimaannya di Kota Jember. Hal ini terbukti dari data yang peneliti peroleh dari Seksi Pusat Informasi Data dan Informasi sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Rencana/ Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	% Realisasi Penerimaan Pajak
2015	Rp 658.842.718.000	Rp 559.285.628.774	85%
2016	Rp 787.206.708.000	Rp 660.923.949.917	84%
2017	Rp 717.309.024.000	Rp 675.869.180.292	94%
2018	Rp 942.659.468.000	Rp 708.280.766.980	75%

Sumber Data: Seksi Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Jember

Tabel 1 diatas menggambarkan dengan sangat jelas bahwa pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak hanya 85% dari target penerimaan. pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2016, persentase realisasi penerimaan turun menjadi 84% dari perencanaan. Sedangkan pada tahun 2017, persentase realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan yaitu 94%. Namun realisasi penerimaan pajak kembali turun drastis pada tahun 2018, yaitu hanya sebesar 75% dari target atau rencana penerimaan pajak.

Akibat adanya penggelapan pajak, munculah persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak, ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak seperti adanya kasus tunggakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak di kota jember seperti pengusaha hiburan malam sebesar 4 miliar rupiah lebih, dan tunggakan ini dilakukan mulai tahun 2018 sampai dengan 2009,. Menurut Suprpto sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah pada tanggal 6 november 2013 , “ada tujuh hotel, lima restoran dan dua tempat hiburan”. Dan menurut Suprpto, tunggakan tersebut berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. (Jember, Kompas.com).

Hal tersebut tentunya akan sangat mempengaruhi penerimaan pajak khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama jember. berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu,

Bagaimana pengaruh faktor Diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak? Bagaimana pengaruh faktor keadilan dalam perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak? Bagaimana pengaruh faktor teknologi dan informasi dalam perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan yang akan dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah untuk: Untuk mengetahui pengaruh faktor Diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak; Untuk mengetahui pengaruh faktor Keadilan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dan Untuk mengetahui pengaruh faktor Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan akademisi mengenai pengaruh diskriminasi, keadilan perpajakan dan teknologi perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak. Penelitian ini diharapkan memberikan kesadaran masyarakat khususnya wajib pajak dalam membayar pajak agar penerimaan pajak semakin meningkat dan mencapai target. Penelitian ini digunakan dalam memberikan pedoman akan pentingnya kesadaran pemenuhan membayar pajak untuk mengurangi

persentase penggelapan pajak dan membantu pemerintah dalam dalam pendanaan pembangunan. Menjadi tambahan wawasan bagi masyarakat khususnya Wajib Pajak jika perbuatan penggelapan pajak merupakan tindakan yang melanggar hukum.

Digunakan untuk memberikan tambahan pengetahuan terkait lingkup perpajakan serta dapat digunakan sebagai referensi dan pembandingan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti baru. Dapat menambah kajian ilmu akuntansi dalam bidang perpajakan yang berkaitan dengan tindakan perpajakan. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Jember. Diharapkan melalui penelitian ini dapat membantu KPP Pratama Jember dalam hal menyusun kebijakan yang tepat serta meningkatkan pelayanan agar meminimalisir terjadinya tindakan penggelapan pajak. Diharapkan melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat membantu kantor pusat atau cabang DJP menyusun kebijakan yang membuat pelayanan lebih baik dan tepat.

Teori Atribusi

Yaitu usaha dalam memahami penyebab diri untuk menilai orang lain tergantung pada makna apa yang dihubungkan ke perilaku tertentu (Robbin,1996). Sebab atau faktor yang mempengaruhi variabel dependen yaitu persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dapat dijelaskan melalui teori atribusi eksternal. Dalam teori atribusi ini, kondisi eksternal nantinya akan mempengaruhi individu untuk berperilaku dan bukan dipengaruhi oleh keinginan dirinya sendiri untuk melakukannya tapi karena paksaan atau keadaan (Robbins, 1996).

Teori Persepsi

Persepsi adalah informasi atau asumsi dari seseorang yang diperoleh dari pengalaman masa lalu yang pernah dirasakan sendiri oleh dirinya, keinginan seseorang dalam membuat suatu keputusan dan dilihat dari informasi yang diberikan orang lain. sehingga dapat dikatakan bahwa persepsi tentang penggelapan pajak timbul karena adanya pengalaman wajib pajak itu sendiri,

sehingga muncullah keinginan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

Teori Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang merupakan orang yang melakukan pemotongan pajak, pemungut pajak dan pembayar pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Teori Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Penggelapan pajak (Tax Evasion) adalah usaha dalam meringankan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak dengan cara ilegal atau melanggar undang-undang yang diatur oleh negara (Mardiasmo, 2016).

Teori Diskriminasi

Menurut UU No 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (3) adalah pelecehan, pengucilan atau pembatasan perilaku secara langsung atau tidak dengan sengaja yang didasarkan karena adanya perbedaan baik dari segi ekonomi, politik, agama, ras dan suku yang menyebabkan penyimpangan HAM dan kebebasan.

Teori Keadilan

Dalam beragama islam diperintahkan bagi semua umatnya untuk menegakkan keadilan pada setiap tindakan yang diperbuat. Menurut KBBI Keadilan adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar dan tidak sewenang-wenang dalam setiap tindakan yang dilakukan.

Teori Teknologi dan Informasi Perpajakan

Perkembangan teknologi dan informasi pada zaman sekarang dirasakan semua orang didalam segala aspek kehidupan. Dengan adanya teknologi memudahkan segala kegiatan contohnya dari satu sistem kita bisa memesan apa saja yang kita butuhkan seperti ketika kita ingin membersihkan rumah atau memesan makanan namun sangat malas, cukup menggunakan satu aplikasi tersebut semua terpenuhi.

Rumusan Hipotesis

Pengaruh Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Tentang Penggelapan Pajak

konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori persepsi yang menyatakan bahwa wajib pajak secara individu menafsirkan kesan indera yang dimiliki agar memberikan makna kepada lingkungan sekitar. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa, maka dari itu peneliti merumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut:

H¹= Diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak.

Pengaruh Keadilan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori persepsi yang menyatakan bahwa wajib pajak secara individu menafsirkan kesan indera yang dimiliki agar memberikan makna kepada lingkungan sekitar. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan maka dari itu peneliti merumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut:

H²= Keadilan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak.

Pengaruh Teknologi dan Informasi Pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori persepsi yang menyatakan bahwa wajib pajak secara individu menafsirkan kesan indera yang dimiliki agar memberikan makna kepada lingkungan sekitar. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan maka dari itu peneliti merumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut:

H²= Keadilan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak

METODE

Jenis dan Sumber Data

Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data primer. Penelitian ini berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember. Penelitian ini akan dimulai pada tanggal 27

Januari 2020 sampai kuesioner bisa terkumpul sesuai sampel yang telah ditentukan.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan kelompok yang ingin di investigasi atau di teliti. Dalam penelitian ini populasi yang ditentukan peneliti yaitu wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di KPP Pratama Jember. Sampel merupakan sebagian dari kelompok populasi. Dalam penelitian ini sampel yang ditentukan oleh peneliti adalah wajib pajak orang pribadi yang ditemui peneliti pada saat berkunjung ke objek penelitian. Dalam menentukan jumlah sampelnya, peneliti juga menentukan rumus slovin sebagai penentunya.

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam pengambilan sampel, metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode Non Probability Sampling.

Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (Tax Evasion).

Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini adalah variabel

Diskriminasi, Variabel Keadilan dan Variabel Teknologi dan Informasi Pajak.

Teknik Pengumpulan Data

penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode survey melalui kuesioner.

Metode Analisis Data

Statistik Deskriptif

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Dalam menguji sah tidaknya kuesioner yang diperoleh, peneliti menentukan uji validitas dengan metode CFA.

Uji Reliabilitas

Dalam menguji seberapa handal jawaban para responden dalam penelitian, peneliti menentukan uji reliabilitas dengan metode Crombach Alpha.

Uji Asumsi Klasik
 Uji Normalitas

Dalam menguji normal atau tidaknya suatu asumsi residual, peneliti menggunakan metode One Sample Kolmogorof Smirnov Test.

Uji Heteroskedastisitas

Dalam menguji heterokedastisitas, peneliti menentukan metode yang digunakan yaitu

Uji Glester.

Uji Multikolinearitas

Dalam menguji multikolinearitas, peneliti menentukan metode Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance Value sebagai penilaiannya.

Uji Hipotesis

Dalam menguji hipotesis, peneliti menentukan metode dalam mengalis menggunakan uji regresi linier berganda.

Uji t

uji t dengan pengukurannya di ukur dengan tingkan signifikansinya.

Uji Koefisien Determinan R²

Pengujian R Square di lakukan karena untuk melihat seberapa besar variabel bebas menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel terikatnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember adalah kantor pelayanan pajak yang dinaungi langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak. Di Jember hanya ada satu KPP Pratama. Dan kantor di jember ini juga berada di bawah arahan Kantor Wilayah III Jatim yang berada di kota Malang. Pada mulanya KPP Pratama Jember merupakan kantor pajak bumi dan bangunan, karena berjalannya waktu DJP melakukan modernisasi dalam bidang perpajakan dengan mengubah kantor pajak bumi dan bangunan Jember menjadi Kantor Pelayanan Pajak Prata Jember. Kantor ini beralamat di Jl Karimata No 54A, Sumpersari Jember.

Hasil Penelitian

Deskripsi Hasil Penelitian

Data yang diperoleh oleh peneliti adalah 100 responden, jadi peneliti hanya mengumpulkan 100 kuesioner yang telah disebar kepada responden untuk dianalisis lebih lanjut lagi.

Dalam penelitian ini, penyebaran kuesioner dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan 28 februari 2020.

Dari data diatas, data tersebut dianggap cukup baik karena nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Min	Max	Mean	Std Deviasi
Diskriminasi	5	17	11.80	2.558
Keadilan	5	17	9.63	2.688
Teknologi dan Informasi Pajak	5	12	8.39	2.044
Persepsi Wajib Pajak	8	19	13.65	2.844

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	KMO MSA	Cut Off	Keterangan
Diskriminasi	0,510	0,5	Valid
Keadilan	0,729	0,5	Valid
Teknologi Perpajakan	0,577	0,5	Valid
Persepsi WP mengenai penggelapan pajak	0,773	0,5	Valid

Sumber : Data diolah Lampiran 5

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Cut Off	Keterangan
Diskriminasi	0,632	0,6	Reliabel
Keadilan	0,762	0,6	Reliabel
Teknologi dan Informasi pajak	0,729	0,6	Reliabel
Persepsi WP mengenai penggelapan pajak	0,770	0,6	Reliabel

Sumber : Data diolah Lampiran 5

Tabel 5. Uji Normalitas (Kolmogorof-Smirnov Test)

	Unstandardized Residual
N	100
Kolmogorof Smirnov Z	0,067
Asymp.Sig.(2-tailed)	0,200

Sumber : Data diolah Lampiran 6

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig
Diskriminasi	0,830
Keadilan	0,865
Teknologi dan Informasi pajak	0,053

Sumber : Data diolah Lampiran 6

Dari hasil tabel tersebut, maka dianggap tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai signifikansi yang dihasilkan lebih dari 0,5.

Tabel 7. Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Diskriminasi	0.987	1.014
Keadilan	0.995	1.005
Teknologi dan Informasi pajak	0.986	1.015

Sumber : Data diolah Lampiran 6

Dari tabel diatas juga dianggap tidak terjadi multikolinearitas karena nilai tolerance kurang dari 0,10 dan VIF lebih dari 10,00.

Tabel 8. Uji Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig
	B	Std Deviasi	Beta			
Constant	2,773	0,258			10,378	0,000
Diskriminasi	0,204	0,076	0,255		2,680	0,009
Keadilan	0,152	0,072	0,201		2,124	0,036
Teknologi dan Informasi	-0,234	0,096	-0,231		-2,433	0,017

Sumber : Data diolah Lampiran 7

Dari tabel diatas maka regresi yang digunakan oleh peneliti yaitu:

$$Y=2.673 +0,204X1 + 0,152X2 - 0,234X3$$

Keterangan :

- Y = Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak
- X1 = Diskriminasi
- X2 = Keadilan
- X3 = Teknologi dan Informasi Pajak

Tabel 9. Uji t

No	Variabel	Signifikasi Hitung	Taraf Signifikan	T hitung	Ket
1	Diskriminasi	0,009	0,05	2,680	Signifikan
2	Keadilan	0,036	0,05	2,124	Signifikan
3	Teknologi dan Informasi	0,017	0,05	-2,433	Signifikan

Sumber : Data diolah Lampiran 7

Variabel diskriminasi berpengaruh signifikan dengan nilai positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Variabel keadilan berpengaruh signifikan dengan nilai positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak..

Variabel teknologi dan informasi pajak berpengaruh signifikan dengan nilai negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Tabel 10. Uji Determinan R²

Model	R	R Square	Adjustud R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,382	0,146	0,120	0,388

Sumber : Data diolah Lampiran 7

R Square yang dihasilkan dari tabel diatas yaitu 0,146 sehingga sebesar 14,6% ketiga variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen.

Pembahasan

Hasil dari pengujian ini menghasilkan variabel diskriminasi berpengaruh signifikan dengan nilai positif. Hubungan koefisien regresi yang ditunjukkan adalah positif yang berarti semakin tinggi variabel diskriminasi maka persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dianggap etis sehingga penggelapan pajak semakin meningkat. Hal ini juga didukung oleh teori persepsi yang menyatakan bahwawajib pajak secara individe menafsirkan kesan yang memberikan makna kepada lingkungan. Sehingga dapat dikatakan bahwa persepsi mengenai penggelapan pajak timbul karena adanya pengalaman wajib pajak sendiri, dan keinginan wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak yang dianggap hal ini dianggap sebagai hal yang wajar.

Hasil dari pengujian ini menghasilkan variabel keadilan berpengaruh signifikan dengan nilai positif. Hubungan koefisien regresi yang ditunjukkan adalah positif

yang berarti semakin baik variabel keadilan maka persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dianggap tidak etis sehingga penggelapan pajak semakin menurun. Hal ini juga didukung oleh teori persepsi yang menyatakan bahwa wajib pajak secara individu menafsirkan kesan yang memberikan makna kepada lingkungan. Sehingga dapat dikatakan bahwa persepsi mengenai penggelapan pajak timbul karena adanya pengalaman wajib pajak sendiri, dan keinginan wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak yang dianggap hal ini dianggap sebagai hal yang wajar.

Hasil dari pengujian ini menghasilkan variabel teknologi dan informasi pajak berpengaruh signifikan dengan nilai negatif. Hubungan koefisien regresi yang ditunjukkan adalah negatif yang berarti semakin baik variabel teknologi dan informasi pajak maka persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dianggap tidak etis sehingga penggelapan pajak

semakin menurun. Hal ini juga didukung oleh teori persepsi yang menyatakan bahwa wajib pajak secara individu menafsirkan kesan yang memberikan makna kepada lingkungan. Sehingga dapat dikatakan bahwa persepsi mengenai penggelapan pajak timbul karena adanya pengalaman wajib pajak sendiri, dan keinginan wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak yang dianggap hal ini dianggap sebagai hal yang wajar.

Dalam penelitian ini variabel yang dikaji hanya variabel diskriminasi, keadilan dan teknologi dan informasi saja, sehingga memungkinkan perbedaan hasil dan kesimpulan apabila dilakukan untuk objek yang berbeda. Dalam penelitian ini hasil pengaruh antara variabel bebas sangat sedikit sehingga banyak faktor atau variabel bebas lain yang mungkin dapat berpengaruh besar terhadap variabel terikat, sehingga penelitiannya dapat bermanfaat lebih bagi objek.

Bahasa Kuesioner yang terlalu tinggi, dan ilmiah sehingga banyak sekali kalimat atau kata yang sulit dipahami oleh responden. Objek penelitian yang kurang di spesifikasi. Dalam penelitian ini metode yang digunakan hanya melalui kuesioner saja tanpa melakukan wawancara dan terlibat langsung dalam aktivitas instansi, sehingga simpulan yang di hasilkan hanya berdasarkan pada instrumen pernyataan kuesioner.

Variabel Diskriminasi menghasilkan nilai t hitung sebesar 2,680, dengan tingkat signifikansi yang dihasilkan 0,009 yang lebih kecil dari taraf nyata 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Variabel keadilan menghasilkan nilai t hitung sebesar 2,124, dengan tingkat signifikansi yang dihasilkan 0,036 yang lebih kecil dari taraf nyata 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Variabel teknologi dan informasi pajak menghasilkan nilai t hitung sebesar -2,433, dengan tingkat signifikansi yang dihasilkan 0,017 yang lebih kecil dari taraf nyata 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Teknologi dan Informasi pajak

berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Dalam uji Determinan R² ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel X dapat menjelaskan pengaruh terhadap variabel Y, dari data yang diolah oleh peneliti pada bab 4 dapat disimpulkan hasil yaitu Variabel diskriminasi, keadilan dan Teknologi dan Informasi Pajak mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak sebesar 14,6% saja, sisanya yaitu sebesar 85,4% mampu dijelaskan oleh variabel lain.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A Mirah & I Gusti. November 2016. Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilandan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol17(2).P.1030-1056
- Ade Mentari. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Universitas Bengkulu.
- Annisa & Nur, 2014, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak, Diponegoro Journal Of Accounting. Vol 3(3).P.1-7.
- CNN Kasus suap Handang Soekarno menghadapi vonis Hakim <https://www.cnnindonesia.com/kasus-suap-pajak-handang-soekarno-hadapi-vonis-hakim>
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. Nota Keuangan dan APBN Republik Indonesia. 2008. Jakarta : Depkeu
- Djp Mitra Pajak Resmi, Klikpajak by Mekari, Kewajiban wajib pajak, 2019.
- Djp Mitra Pajak Resmi, Klikpajak by Mekari, Ketahui Sejarah, Tugas, Fungsi dan Struktur KPP Pratama, 2020.
- Djp ditjen pajak jemput paksa tersangka kasus penggelapan pajak <https://www.pajak.go.id/id/ditjen->

pajak-jemput-paksa-tersangka-
kasus-penggelapan-pajak-di-riau

Kementerian keuangan Republik
Indonesia, Berita, Hak-Hak Wajib
Pajak Menurut Undang-Undang
Tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan.

Mardiasmo.(2016).perpajakan Edisi Revisi
Tahun 2016.Yogyakarta:Penerbit
Andi

Miftahuh Jannah, Bety. 2015.Pengaruh
Keadilan, Sistem Perpajakan,
Diskriminasi dan Pengetahuan
Perpajakan Terhadap Persepsi
Wajib Pajak Mengenai Etika
Penggelapan Pajak. Universitas
Muhammadiyah Malang.

Nelphy & Ari, November 2016.Persepsi
Calon Wajib Pajak dan Wajib Pajak
Terhadap Penggelapan Pajak Di
Salatiga.Berskala Akuntansi dan
Keuangan Indonesia.Vol1(1).P1-14.

Ni Komang & Ni Ketut, Maret 2017,Faktor-
Faktor Yang Mempengaruhi
Persepsi Wajib Pajak Mrngnai
Etika Penggelapan Pajak.E-Jurnal
Akuntansi Universitas Udayana. Vol
18(3).P.2534-2564

Santoso,Singgih.(2015).Menguasai SPSS
22.Jakarta:Penerbit PT Elex Media
Komputindo

Sekar Akrom.Agustus 2018.Persepsi
Keadilan, Sistem Perpajakan dan
Diskriminasi Terhadap Etika
Penggelapan Pajak.
Akuntabilitas:Jurnal Ilmu
Akuntansi.Vol11(1),P.53-74.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Pembayaran Wajib Pajak

Wikipedia Ensiklopedia.Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
Indonesia.2008.Jakarta:Wikipedia

Wiyana Chaironisyah, Renadya.
2018.Faktor-Faktor yang

Mempengaruhi Persepsi Wajib
Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika
Atas Penggelapan Pajak (Tax
Evasion). Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang.